

**PERAN KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA  
PENERIMA RASKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

*(The Role of Policy Raskin in Spending Patterns Receptient of Household at Bandar Lampung City)*

Eka Prianti, Bustanul Arifin, Adia Nugraha

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1  
Bandar Lampung 35145, Telp. 08576878422, e-mail: ekaprianty03@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the role of raskin (poor rice) policy toward household expenditure pattern and household response toward the policy of Raskin food card replacement in Bandar Lampung City. The numbers of respondents in this research were 137 respondents that were determined by accidental sampling method. The data was analyzed by descriptive analysis, different test and cross tabulation. The results showed that there was reduction of household expenditure burden for grain after receiving Raskin subsidy that was equal to 4.69 percent. There was consumption escalation of vegetable protein sources (1%), animal protein sources (2.22%) and fruit (1%) of households in Bandar Lampung City after receiving Raskin subsidy. Household non-food expenditures, such as household needs, clothing, housing and telecommunications were increased by less than 1 percent. The factors that affected household responses in Bandar Lampung City to food card policy was the number of dependents and income, while the age and education of respondents did not affect the response of households in Bandar Lampung to Raskin card policy.*

*Key words: expenditure pattern, food card, raskin*

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan (Sunarti 2006). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup besar. Angka kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2016 masih tinggi yaitu 14,29 persen atau 1.143 ribu jiwa. Artinya terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sekitar 1956 ribu jiwa atau 0,7 persen.

Bandar Lampung sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Lampung juga masih memiliki tantangan dalam memerangi kemiskinan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2015 diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Bandar Lampung masih tinggi, yaitu 10,85 persen dan masih memiliki 58.486 keluarga pra sejahtera.

Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan pilihan dalam

membelanjakan pendapatannya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu (Triana 2011).

Penyediaan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau tetap merupakan prioritas utama pembangunan, oleh karena itu pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam hal ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu paket kebijakan ekonomi perberasan nasional dalam program jaminan ketersediaan pangan bagi konsumen rawan pangan adalah menetapkan pendistribusian/bantuan pangan bagi kelompok miskin (kebijakan Raskin).

Hastuti (2012) menyatakan bahwa program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga. Pola pengeluaran dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh pendapatan dan perubahan

harga. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin. Koutsoyianis (1975) berpendapat subsidi bahan pangan kepada penduduk miskin akan meningkatkan kesejahteraan penerima subsidi.

Kriteria kemiskinan penduduk pedesaan dan perkotaan diukur berdasarkan konsumsi pangan (Sayogya 2004). Subsidi Raskin diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima raskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalih ketahanan pangan dan kesejahteraan, program Raskin hingga sekarang masih dilanjutkan, tak terkecuali di daerah perkotaan yaitu Bandar Lampung. Selama 13 tahun program Raskin berjalan, namun keadaan ekonomi penduduk Bandar Lampung belum juga membaik. Meskipun pemerintah telah berupaya memperbaiki konsep dan pelaksanaan program Raskin, namun banyak pihak masih mempertanyakan efektivitas program tersebut. Evaluasi Raskin selama ini lebih banyak menyorot masalah efektivitas pelaksanaan program seperti pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Padahal, efektifitas program tidak hanya dievaluasi dalam jangka pendek melalui ketepatan sasaran program semata namun juga harus memperhatikan pencapaian tujuan program

Berdasarkan hasil survei, implementasi kebijakan Raskin di Indonesia berjalan kurang efektif, maka dari itu saat ini pemerintah telah memperbaiki kebijakan Raskin dengan sistem baru yaitu Voucher/kartu pangan. Hal ini dilatarbelakangi permasalahan penyaluran Raskin yang tak tepat sasaran, baik secara kuantitas, kualitas, dan waktu.

Rencana perubahan program subsidi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) menjadi bantuan pangan dengan sistem kartu/voucher telah diluncurkan pada awal tahun 2017 dan akan di uji coba pada 44 kota termasuk kota Bandar Lampung. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dengan tujuan yaitu, mengetahui peran kebijakan Raskin

terhadap pola pengeluaran rumah tangga di Kota Bandar Lampung, dan mengetahui respon masyarakat terhadap kartu pangan pengganti kebijakan Raskin.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Way Lunik dan Desa Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Panjang merupakan daerah perkotaan paling miskin karena mempunyai jumlah keluarga prasejahtera paling banyak.

Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah tangga sasaran penerima manfaat program Raskin 2015 di Kota Bandar Lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael, diperoleh jumlah sampel sebanyak 71 orang di Desa Way Lunik dan 66 orang di Desa Srengsem. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017.

Penelitian dilakukan dengan metode survei. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada responden rumah tangga penerima Raskin dan data sekunder yang diperoleh dari publikasi instansi atau lembaga terkait yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan rumah tangga penerima Raskin. Data diperoleh dengan metode recall yaitu bertanya bagaimana pengeluaran konsumsi rumah tangga ketika menerima raskin dan tidak menerima raskin. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka dan tabulasi.

Selain dilakukan analisis secara tabulasi, akan dilakukan juga uji beda (Kuncoro 2004), untuk mengetahui secara statistik parametrik apakah ada perbedaan konsumsi pangan dan non pangan rumah tangga Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin. Sampel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sampel rata-rata pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sebelum menerima subsidi Raskin ( $X_1$ ) dan sampel rata-rata pengeluaran

konsumsipangan rumah tangga sesudah menerima Raskin ( $X_2$ ) dengan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0: X_1 = X_2$ , artinya tidak ada perbedaan pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sebelum menerima subsidi Raskin sesudah menerima subsidi Raskin.
2.  $H_1: X_1 \neq X_2$ , artinya ada perbedaan pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sebelum menerima subsidi Raskin sesudah menerima subsidi Raskin.
3. Kriteria : tolak  $H_0$  apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau Signifansi kurang dari 0,05

Analisis tabulasi silang (*Crosstab*) digunakan dengan menggunakan variabel usia ( $X_1$ ), pendidikan ( $X_2$ ), jumlah tanggungna ( $X_3$ ), dan pendapatan ( $X_4$ ). Masing-masing vaiabel akan dikombinasikan dengan respon rumah tangga terhadap kebijakan kartu pangan (setuju/tidak setuju). *Crosstab* dapat menggambarkan keterkaitan hubungan antara karakteristik responden dengan pengambilan keputusan (setuju/tidak setuju) terhadap kebijakan kartu pangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Subsidi Raskin terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

Secara garis besar kebutuhan konsumsi barang dan jasa pada rumah tangga terdiri dari dua kelompok yaitu kebutuhan pangan dan non pangan. Menurut Sihombing (2010), dalam hukum Engel dikemukakan kaitan antara tingkat pendapatan dengan konsumsi (pengeluaran). Hukum ini menyatakan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah akan mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk membeli konsumsi pokok (pangan), sementara rumah tangga yang berpenghasilan tinggi hanya akan membelanjakan sebagian kecil saja dari total pengeluaran untuk kebutuhan pokok

Pola konsumsi adalah cara seseorang atau sekelompok orang memilih makanan. Hasil survei memberikan informasi bahwa terdapat beberapa pengeluaran pangan yang berubah ketika sebelum dan sesudah memperoleh Raskin. Berikut Rata-rata pengeluaran pangan sebelum dan sesudah menerima raskin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata pengeluaran pangan rumah tangga sebelum-setelah menerima raskin

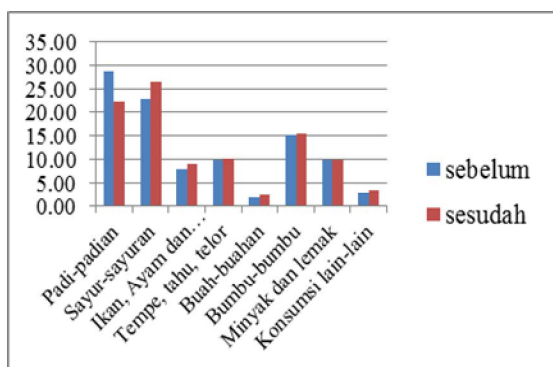
Pengeluaran	Sebelum Raskin		Sesudah Raskin	
	Rata-rata (Rp/bln)	(%)	Rata-rata (Rp/bln)	(%)
Padi-padian	256.204	28.89	237.093	25.25
Sayuran	200.949	22.66	202.869	21.60
Pro hewani	70.365	7.93	90.299	9.62
Pro nabati	108.212	12.20	113.350	12.07
Buah	21.022	2.37	28.993	3.09
Bumbu	126.715	10.45	126.686	13.49
Lemak	85.635	9.66	86.285	9.19
Lain- lain	51.897	5.85	53.482	5.70
Jumlah	886.935	100	939.057	100

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa terdapat beberapa pengeluaran panga rumah tangga yang berubah ketika sebelum dan sesudah memperoleh Raskin. Persentase konsumsi padi-padian mengalami penurunan sebesar 3,64 persen dari total pengeluaran. Artinya, terjadi pengurangan pengeluaran beras sebesar Rp19.111 yang diperoleh dari kontribusi subsidi Raskin yang diterima oleh rumah tangga.

Tabungan implisit yang diperoleh dari selisih harga pembelian beras tidak secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Jumlah beras Raskin yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras sebulan, sehingga tabungan implisit tersebut lebih digunakan untuk membeli tambahan kebutuhan pangan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa konsumsi pangan selain beras yang mengalami peningkatan setelah menerima subsidi.

Kontribusi subsidi Raskin paling besar digunakan untuk pengeluaran sumber protein hewani yaitu ikan, ayam dan daging yang mengalami peningkatan sebesar 1,68 persen. Peningkatan juga terjadi ada pengeluaran konsumsi buah-buahan sebesar 0,8 persen. Berbeda dengan pengeluaran konsumsi sayur-sayuran, bumbu-bumbu, dan minyak tidak banyak mengalami perubahan setelah rumah tangga menerima raskin Hal ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Wicaksono (2013) yang menyatakan bahwa kebijakan raskin di Kabupaten Purbalingga hanya meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran kurang dari 1 persen.

Perbedan pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah menerima raskin dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 1.



Gambar 1. Rata-rata pengeluaran pangan sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin

Data pada Gambar 1 menginformasikan bahwa pengeluaran untuk padi-padian masih merupakan pengeluaran yang terbesar yaitu 28,89 persen dariseluruh konsumsi pangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ariani (2010) yang menyatakan bahwa pola konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia masih berupa pola pangan tunggal yaitu beras.

Data pada Gambar 1, dapat dilihat dengan jelas bahwa ada perbedaan rata-rata pengeluaran pangan sebelum dan sesudah rumah tangga memperoleh Raskin kontribusi subsidi Raskin terhadap pengeluaran baik pangan dapat diketahui melalui perubahan rata-rata pengeluaran padi-padian, sumber protein hewan, sumber protein nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak dan lemak, bumbu-bumbuan, dan konsumsi lain-lain.

Perbedaan terlihat pada konsumsi protein hewan dan buah-buahan. Harga ikan ayam, daging dan buah-buahan yang cukup mahal membuat rumah tangga jarang sekali mengonsumsi komoditas pangan tersebut. Namun, ketika rumah tangga memperoleh subsidi Raskin, rumah tangga memanfaatkan subsidi Raskin tersebut untuk membeli komoditas yang menurut mereka jarang sekali dikonsumsi.

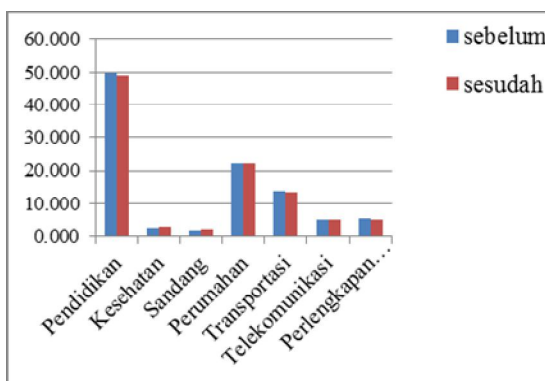
Subsidi Raskin juga mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga pada pengeluaran non pangan, namun pengaruh tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan pengaruh Raskin terhadap pengeluaran pangan. Pengeluaran non pangan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam bentuk selain pangan, yaitu sandang, perumahan, pendidikan, transportasi, kesehatan, telekomunikasi, dan perlengkapan mandi cuci seperti yang dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata pengeluaran non pangan sebelum-setelah menerima raskin

Pengeluaran	Sebelum Raskin		Sesudah Raskin	
	Rata-rata (Rp/bln)	(%)	Rata-rata (Rp/bln)	(%)
Pendidikan	369.949	49,59	370.591	49,04
Kesehatan	18.417	2,46	21.106	2,79
Sandang	12.305	1,65	16.955	2,24
Perumahan	165.810	22,22	166.949	22,09
Transportasi	102.463	13,73	101.728	13,46
Komunikasi	38.089	5,10	39.178	5,18
Alat cuci	38.949	5,22	39.168	5,18
Jumlah	745.982	100	755.674	100

Data pada Tabel 2 memberikan informasi bahwa terdapat beberapa pengeluaran non pangan yang berubah ketika sebelum dan sesudah petani memperoleh Raskin. Sebelum menerima Raskin, jumlah pengeluaran non pangan rata-rata rumah tangga di Kota Bandar Lampung adalah Rp745.982 setiap bulan, sedangkan setelah menerima subsidi Raskin, pengeluaran konsumsi non pangan meningkat menjadi Rp755.674 per bulan. Selisih Rp9.692 diperoleh dari kontribusi subsidi Raskin dan oleh rumah tangga dialihkan untuk konsumsi beberapa kebutuhan non pangan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, perumahan, transportasi, telekomunikasi dan perlengkapan cuci/mandi.

Adanya perbedaan rata-rata pengeluaran non pangan sebelum dan setelah rumah tangga memperoleh Raskin menunjukkan besarnya perubahan konsumsi rata-rata pengeluaran non pangan. Perubahan secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 2.



Gambar 2. Rata-rata pengeluaran non pangan sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin

Berdasarkan data pada Gambar 2, pengeluaran non pangan terbesar setelah menerima Raskin masih pengeluaran untuk biaya pendidikan yaitu

sebesar 49,59 persen. Hal ini disebabkan karena banyak rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah sehingga harus mengeluarkan uang saku sehari dan SPP. Pengeluaran untuk sandang naik menjadi 2,24 persen. Pengeluaran perumahan, telekomunikasi seperti biayanya pulsa. biaya kesehatan, transportasi dan alat cuci tidak mengalami perubahan pengeluaran signifikan antara sebelum dan sesudah menerima raskin, perubahan hanya kurang dari 1 persen.

Selain dilakukan analisis secara tabulasi, dilakukan juga uji beda untuk mengetahui secara statistik parametrik apakah ada perbedaan konsumsi pangan maupun konsumsi non pangan rumah tangga Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin. Berikut hasil uji beda akan disajikan dalam Tabel 3 dan 4.

Berdasarkan data Tabel 3, diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. Artinya ada perbedaan antara rata-rata pengeluaran pangan rumah tangga sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin dengan taraf kepercayaan 90%. Perbedaan disebabkan oleh subsidi beras yang diterima oleh masing-masing rumah tangga, sehingga pengeluaran untuk konsumsi pangan berkurang dan oleh sebagian responden dialihkan pada konsumsi non pangan. Berikut adalah hasil uji beda rata-rata pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah menerima subsidi raskin yang akan dijabarkan dalam data pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Hasil uji beda rata-rata pengeluaran konsumsi pangan sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin

		Pair
		Sebelum-Sesudah
P. Differentcess	Mean	-1.844E4
	Std. Deviation	42560.714
	Std. Error Mean	3636.207
	90% C. Interva lower	-24458.590
	of the D. upper	-12414.490
T		-5.070
Df		136
Sig (2-tailed)		.000

Tabel 4. Hasil uji beda rata-rata pengeluaran konsumsi pangan sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin

		Pair
		Sebelum-Sesudah
P. Differentcess	Mean	-9.504E3
	Std. Deviation	21862.580
	Std. Error Mean	1867.846
	90% C.I Lower	-12597.055
	of the D. Upper	-6410.244
T		-5.088
Df		136
Sig (2-tailed)		.000

Berdasarkan data pada Tabel 4 diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. Artinya pengeluaran rata-rata non pangan rumah tangga sebelum menerima subsidi Raskin dan pengeluaran non pangan rumah tangga sesudah menerima subsidi Raskin berbeda nyata dengan taraf kepercayaan 90%. Hal ini disebabkan karena sebagian rumah tangga yang sudah merasa terpenuhi kebutuhan pangan sehingga mengalihkan sebagian subsidi raskin untuk kebutuhan non pangan yang belum terpenuhi. Pengeluaran non pangan sebelum dan sesudah menerima raskin dikatakan berbeda meskipun perubahan tidak signifikan.

Hasil dua analisis sebelumnya menggunakan tabulasi dan uji beda terlihat bahwa bantuan subsidi Raskin yang diberikan pemerintah dapat mengubah pola konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Pengeluaran untuk kebutuhan pangan memiliki persentase perubahan yang lebih besar dari pada konsumsi non pangan. Hal ini terjadi karena rata-rata penerima Raskin adalah keluarga pra sejahtera dengan pendapatan yang rendah sehingga rumah tangga masih membutuhkan tambahan biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa program subsidi Raskin memiliki berdampak positif bagi pola konsumsi rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Meskipun dalam implementasi masih mengalami berbagai kondisi yang melemahkan tercapainya tujuan program, namun program Raskin tetap memiliki manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari berkaitan dengan tercapainya ketahanan pangan.

Tujuan utama Raskin adalah untuk meringankan beban pengeluaran, namun tampaknya implementasi program baru sebatas mengurangi sedikit masalah bukan mengatasi masalah.

Tabungan implisit yang diperoleh dari selisih harga pembelian beras tidak secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Jumlah beras Raskin yang diperoleh sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras sebulan, sehingga tabungan implisit tersebut lebih banyak digunakan untuk membeli tambahan kebutuhan pangan lainnya.

**Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Respon Rumah tangga Terhadap Voucher/Kartu Pangan Pengganti Program Raskin**

Pendistribusian raskin di Kota Bandar Lampung belum bisa dikatakan efektif. Berbeda dengan penelitian Wirda (2014) yang menyatakan bahwa pendistribusian raskin pada sentra penduduk miskin di Provinsi Lampung termasuk dalam kategori cukup efektif.

Berdasarkan data penelitian, diperoleh hasil bahwa dari 137 responden terdapat 55 responden yang memiliki pendapatan per kapita diatas garis kemiskinan (364,92). Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa program raskin di Kota Bandar Lampung belum tepat sasaran. Harapannya, sistem voucher pangan akan jauh lebih baik daripada sistem bantuan pangan dengan pola raskin.

Saat ini, pemerintah telah memperbaiki kebijakan Raskin dengan sistem baru yaitu vaucher/kartu pangan. Respon warga terhadap rencana kebijakan vaucher pangan pengganti Raskin tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan program disuatu wilayah. Penelitian di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung menunjukan bahwa 82 dari 137 responden menyatakan setuju terhadap katu pangan sedangkan 55 responden menyatakan tidak setuju. Gambaran jawaban responden mengenai kartu pangan dapat dilihat dari hasil kuesioner dan dianalisis menggunakan tabulasi silang dan chi square.

Tabulasi silang digunakan untuk mengaitkan antara variabel respon rumah tangga mengenai vouncher pangan dengan karakteristik masyarakat yakni usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan pendapatan yang akan dijabarkan dalam Tabel 5, 6, 7 dan 8.

Tabel 5. Tabulasi silang antara usia dan pendidikan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan

Respon Kartu pangan	Usia dan pendidikan				Total
	A	B	C	D	
Tidak Setuju	4	32	15	4	55
Setuju	9	42	25	6	82
Total	13	74	40	10	137

Berdasarkan Tabel 5, responden yang tidak setuju terhadap kartu pangan ada sejumlah 55 orang. Kelompok ini didominasi oleh kelompok responden karakteristik B yaitu responden dengan usia muda dan pendidikan tinggi yaitu sebanyak 32 orang. 15 orang berusia tua dan pendidikan rendah (C), sedangkan sisanya 8 orang masing-masing 4 orang berusia muda dan pendidikan rendah (A), 4 orang lainnya beusia tua dan pendidikan tinggi (D).

Kelompok responden yang menyatakan setuju terhadap kartu pangan lebih banyak yaitu sebanyak 82 orang yang juga didominasi oleh responden dengan karakteristik usia muda dan pendidikan tinggi (B) yaitu sebanyak 42 orang. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel (baris dan kolom) tersebut dilakukan uji Chi-square yang akan dijabarkan dalam Tabel 15.

Berdasarkan Tabel 6, memperlihatkan nilai *chi-square* sebesar 0,828. Artinya, variabel usia dan pendidikan dengan respon rumah tangga tidak berhubungan dengan respon rumah tangga terhadap kebijakan kartu pangan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa faktor usia dan pendidikan tidak berkaitan dengan respon rumah tangga kota Bandar Lampung terhadap Kartu pangan. Lamanya usia dan jenjang pendidikan seseorang tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 6. Hasil uji chi-square antara variabel usia dan pendidikan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan

	Value	Df	(2-sided)
Chi-Square	.888 <sup>a</sup>	3	.828
Likelihood Ratio	.902	3	.825
Fisher's Exact Test	.894		
Linear-by-Linear	.001 <sup>c</sup>	1	.976
N of Valid Cases	137		

Tabel 7. Tabulasi silang antara jumlah tanggungan dan pendapatan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan

Respon Kartu pangan	Jumlah tanggungan dan pendapatan				Total
	E	F	G	H	
Tidak Setuju	22	15	11	7	55
Setuju	41	5	30	6	82
Total	63	20	41	13	137

Berdasarkan Tabel 7, responden yang tidak setuju terhadap kartu pangan ada sejumlah 55 orang. Kelompok ini didominasi oleh responden karakteristik E yaitu mempunyai jumlah tanggungan sedikit dengan pendapatan rendah yaitu sebanyak 22 orang. Responden yang tidak setuju diantaranya mempunyai 15 orang mempunyai jumlah tanggungan sedikit dengan pendapatan tinggi (F), 11 orang jumlah dengan tanggungan banyak dan pendapatan rendah (G) dan 7 orang sisanya mempunyai jumlah tanggungan banyak dengan pendapatan tinggi (H).

Kelompok responden yang menyatakan setuju terhadap kartu pangan lebih banyak yaitu sebanyak 82 orang yang juga didominasi oleh responden yang mempunyai jumlah tanggungan sedikit dengan pendapatan rendah (E) yaitu sebanyak 41 orang serta 30 orang dengan jumlah tanggungan banya dan pendapatan rendah (G).

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel (baris dan kolom) tersebut akan dibuktikan secara statistik yaitu dengan melakukan uji Chi-square yang akan dijabarkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil uji chi-square antara jumlah tanggunga dan pendapatan dengan respon rumah tangga terhadap kartu pangan

	Value	df	Sig. (2-sided)
Chi-Square	14.868 <sup>a</sup>	3	.002
Likelihood Ratio	14.924	3	.002
Fisher's Exact Test	14.549		
Linear-by-Linear	.052 <sup>c</sup>	1	.820
N of Valid Cases	137		

Berdasarkan Tabel 8, yaitu tabulasi silang antara jumlah tanggungan dan pendapatan dengan respon rumah tangga, memperlihatkan nilai *chi square* sebesar 0,002. Artinya, variabel jumlah tanggungan dan pendidikan berhubungan dengan respon rumah tangga kota Bandar Lampung terhadap kebijakan kartu pangan. Banyaknya jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan rumah tangga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak jumlah tanggungan dan rendahnya pendapatan maka pengeluaran pangan rumah tangga akan semakin besar. Responden akan setuju dengan kebijakan kartu pangan dengan harapan dapat memperoleh subsidi beras lebih banyak sehingga akan membantu mengurangi pengeluaran pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Kelompok responden yang mempunyai jumlah tanggungan yang sedikit dan pendapatan yang tinggi akan cenderung untuk tidak setuju terhadap program kartu pangan. Hal ini karena mereka tidak termasuk dalam kriteria penerima manfaat kartu raskin dan merasa khawatir tidak menerima bantuan raskin kembali.

### KESIMPULAN

Terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung antara sebelum dan sesudah menerima subsidi Raskin. Terjadi pengurangan beban pengeluaran padi-padian rumah tangga setelah menerima subsidi Raskin yaitu sebesar 2,57 %. Terjadi peningkatan konsumsi sumber protein hewani (2%), buah-buahan (1%) dan sumber protein nabati (0,32%) rumah tangga di Kota Bandar Lampung setelah menerima subsidi Raskin. Pengeluaran non pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung tidak banyak mengalami perubahan setelah menerima raskin, seperti kebutuhan kesehatan, sandang, perumahan dan telekomunikasi yang hanya meningkat kurang dari 1%. Jumlah tanggungan dan pendapatan berhubungan dengan respon rumah tangga terhadap kebijakan kartu pangan di Kota Bandar Lampung, sedangkan usia dan pendidikan responden tidak.

### DAFTAR PUSTAKA

Ariani M. 2010. *Diversifikasi Pangan Pokok Mendukung Swasembada Beras*. Badan Ketahanan. Jakarta.

- BPS. 2016. *Sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2016*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Ekafitri W, Hasyim IA, dan Soelaiman A, 2014. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin Pada Sentra Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung. *JIIA*, 2 (1): 85-92. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/556/518>. [10 Mei 2017].
- Hastuti B. Sulaksono, dan S. Mawardi. 2012. *Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Kuncoro M. 2004. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Paruliang J, Lestari DAH, dan Adawiyah R. 2014. Pola Konsumsi Daging Sapi Oleh Rumah Tangga Di Bandar Lampung. *JIIA*, 2 (1): 85-92. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/991/896>. [25 Mei 2017].
- Sayogyo. 2004. *Sosiologi Pedesaan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sugiarto. 2003. *Teknik Sampling*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunarti E. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan*. Naskah Akademis. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Triana RAL. 2011. Pengaruh Kebijakan Subsidi Beras Miskin dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Pengeluaran Telekomunikasi dan Rokok Rumah Tangga Miskin di Pulau Jawa. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wicaksono N. 2013. Peran Kebijakan Raskin Terhadap Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Petani dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalinggo. *Tesis*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.